

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara garis besar pengertian provinsi adalah sebuah wilayah tertentu yang berada di bawah wilayah negara (nasional). Sebuah Provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur, dan provinsi terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota. Saat ini Indonesia memiliki 34 Provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote, dari 34 provinsi tersebut beberapa diantaranya adalah provinsi baru hasil pemekaran setelah masuk era reformasi pada tahun 1999. Pada tahun 1999 Indonesia hanya memiliki 26 provinsi setelah lepasnya Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi. Namun setelah itu Indonesia banyak mengalami perubahan khususnya untuk jumlah provinsi, tercatat hingga saat ini Indonesia telah memiliki 8 provinsi baru. Dan inilah nama-nama provinsi baru di Indonesia hasil pemekaran beserta dengan nama ibukotanya dan tahun terbentuknya.

1. Provinsi Maluku Utara, provinsi dengan ibukota di Kota Sofifi ini terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Maluku ini merupakan provinsi di Indonesia yang ke-27.
2. Provinsi Banten, provinsi dengan ibukota di Kota Serang ini terbentuk pada tanggal 17 Oktober 2000. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran Provinsi Jawa Barat ini merupakan provinsi di Indonesia yang ke-28.
3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, provinsi dengan ibukota di Kota Pangkal Pinang ini terbentuk pada tanggal 4 Desember 2000. Provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi provinsi ke-29.
4. Provinsi Gorontalo, provinsi dengan ibukota di Kota Gorontalo ini terbentuk pada tanggal 22 Desember 2000. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara ini adalah provinsi ke-30 Indonesia.
5. Provinsi Papua Barat, provinsi yang beribukota di Kota Manokwari ini terbentuk tanggal 21 November 2001. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua ini merupakan provinsi di Indonesia ke-31.

6. Provinsi Kepulauan Riau, provinsi dengan ibukota Tanjung Pinang itu terbentuk pada tanggal 25 Oktober 2002. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Riau ini menjadi provinsi yang ke-32 di Indonesia.
7. Provinsi Sulawesi Barat, provinsi yang ibukotanya di Kota Mamuju ini terbentuk tanggal 5 Oktober 2004. Provinsi yang terbentuk dari pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan provinsi ke-33 Indonesia.
8. Provinsi Kalimantan Utara, provinsi dengan ibukotanya Tanjung Selor ini terbentuk pada tanggal 25 Oktobe 2012. Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur dan menjadi provinsi ke-34 Indonesia

Wacana pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Jawa Timur mengemuka pada tahun 2105, ialah pembentukan provinsi Madura. Pada saat yang sama, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang memoratorium atau menghentikan sementara pengambilan kebijakan pemekaran daerah otonom baru hingga selesainya desain besar (*grand design*) penataan daerah hingga 2025. Namun pada konteks ini Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berpandangan, daerah yang menjadi prioritas atau target untuk dimekarkan adalah daerah-daerah perbatasan. Sebab, selama ini daerah-daerah perbatasan, terutama di daerah Indonesia bagian timur seperti Papua, masyarakatnya masih jauh dari taraf hidup yang layak. Dalam artian, tujuan dari suatu daerah dimekarkan diantaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut anggota Komisi II DPR RI, Tamanuri, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2/2016), komisi II segera mengadakan rapat dengan Mendagri untuk menagih sejumlah Peraturan Pemerintah. "Rancangan Peraturan Pemerintah dari Mendagri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) tentang Pemekaran Daerah menurut rencana akan diajukan pada bulan Maret 2016. Minggu ketiga bulan Februari 2016 ini DPR RI akan rapat dengan Mendagri guna menentukan mana-mana saja daerah yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan pemekaran, termasuk membahas wacana pemekaran Madura sebagai Provinsi" (Detik.com, 11-02-2016).

Sampai dengan awal tahun 2016, sudah ada 201 usulan daerah otonomi baru (DOB). Artinya, ada 87 usulan DOB warisan dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY)-Boediono dan ditambah 114 usulan DOB di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sementara, semenjak Otonomi Daerah diberlakukan pada 1999 hingga Desember 2015, di Indonesia telah ada 34 provinsi, 508 kabupaten/kota.

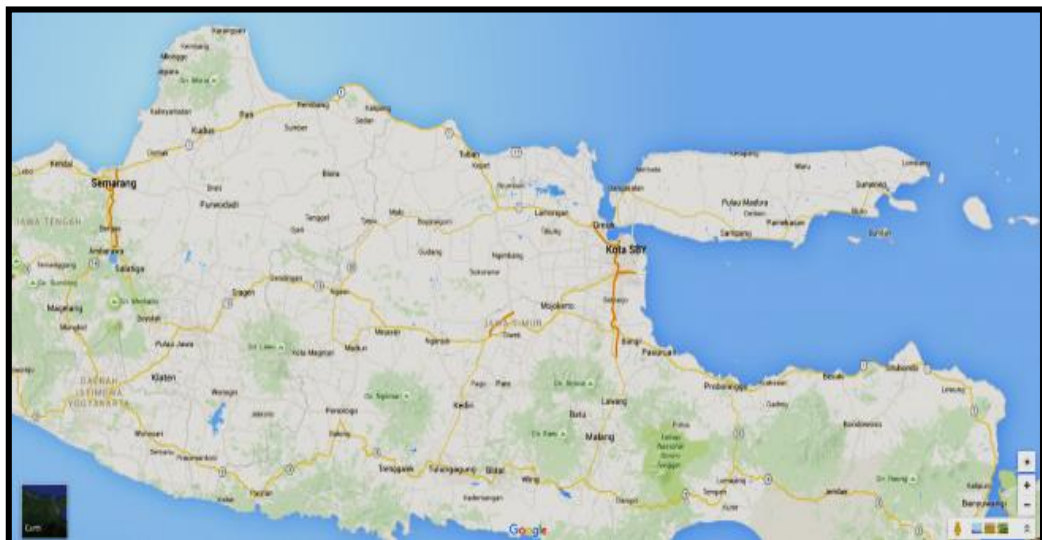
Pada tanggal 10 Nopember 2015, ratusan warga menghadiri acara Deklarasi pemekaran Provinsi Madura yang berlangsung di Gedung Rato Ebu Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Mereka pun menyatakan siap untuk memenuhi syarat agar Madura dapat berdiri sebagai provinsi baru. Sejumlah spanduk tersebar di sekitar gedung. Spanduk dilengkapi dengan tulisan '*Selamat Datang di Provinsi Madura*' Inkap dengan logo Provinsi Madura. Selain Panitia Pembentukan Provinsi Madura (P4M) dari empat kabupaten, sejumlah tokoh masyarakat juga menghadiri acara itu. Salah satu di antaranya tokoh agama yang hadir pada acara itu adalah KH Badri Zaini dan H Rawi yang sekaligus menjadi penggagas Provinsi Madura. Acara berlangsung mulai pukul 14.00 WIB hingga 16.30. Tak tampak perwakilan dari empat pemerintah kabupaten yang berada di Pulau Garam itu. Meski demikian, peserta deklarasi menyatakan sikap sepakat untuk mewujudkan Madura menjadi provinsi baru dan melepaskan diri dari Jawa Timur. Caranya yaitu memenuhi syarat menjadi provinsi baru. Satu di antaranya memiliki lima kabupaten dan kota di Pulau Madura.

Wacana Madura menjadi provinsi tersendiri, terpisah dari Jawa Timur memicu kontroversi. Warga di Pulau Madura masih berbeda pendapat mengenai wacana tersebut. Ada yang menyatakan setuju dengan pembentukan Provinsi Madura, namun tidak sedikit pula di antara masyarakat di empat kabupaten itu yang menyatakan menolak.

Menurut Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman, seluruh fraksi di komisi yang dipimpin memberikan apresiasi dan dukungan atas adanya usulan pembentukan Madura menjadi provinsi seperti yang disampaikan oleh Panitia pembentukan Provinsi Madura di DPR. Namun, pihaknya hanya sebatas

menerima usulan. Sebab, kewenangan pemekaran daerah berada di Pemerintah melalui Kemendagri. Sebab itu, Komisi II menyarankan agar mereka berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Komisi II DPR menyarankan agar daerah-daerah yang mengusulkan pemekaran untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan menempuh langkah-langkah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan.

Sekretaris Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) Jimhur Saros, menyampaikan bahwa potensi yang dimiliki Madura amat mendukung untuk mandiri sebagai Provinsi, seperti produksi garam, produksi sapi, tembakau hingga pertambangan; tapi sayang, Indonesia sekarang malah impor garam dari luar. Koordinator P4M lainnya, Abdul Aziz Salim Syabibi menambahkan gagasan pemekaran ini sudah di mulai sejak tahun 2000 dengan mengacu pada sejarah. Menurutnya, Madura punya kekhasan tersendiri dibanding dan berbeda dari kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur. Sejak Zaman Belanda Madura berdiri sendiri, baru pada 1955 Madura digabung dengan Jawa Timur. Aziz menerima hasil konsultasi dengan Komisi II dan akan melengkapi kekurangan agar Madura bisa menjadi provinsi sendiri.



Gambar 1.1.

Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Timur

Menurut Bupati Pamekasan Achmad Syafii, keinginan sebagian masyarakat untuk menjadikan Pulau Madura terpisah dari Provinsi Jawa Timur, harus dihargai, karena hal itu berarti memiliki keinginan kuat untuk menjadi masyarakat Madura lebih mandiri. Hanya saja, menurutnya, masih banyak hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya tentang potensi anggaran dan komitmen dari para pihak, serta pentingnya satu suara untuk membentuk Madura menjadi provinsi.

(<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/11/09/nxijxa382-kontroversi-pembentukan-provinsi-madura>).

Barangkat dari fenomena ini dapat dibangun asumsi bahwa : (1) telah berkembang wacana tentang pembentukan Pemerintah Provinsi Madura, sebagai pemekaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur; (2) terdapat pro dan kontra terhadap wacana tentang pembentukan Pemerintah Provinsi Madura, dengan alasan masing-masing; (3) pada saat yang sama saat ini Pemerintah sedang menyusun draft Peraturan Pemerintah tentang *Grand Design* Pemekaran Daerah di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut, dipandang perlu melakukan kajian ini, dengan judul kegiatan : “Kajian Wacana Pembentukan Pemerintah Provinsi Madura”.

1.2. Rumusan Masalah

Sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam peneitian ini, dan yang menjadi bintang penunjuk jalan atas pelaksanaan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Potensi Anggaran, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki wilayah Madura dalam Pembentukan Pemerintah Provinsi Madura ?
2. Bagaimana aspirasi/opini dari Pemerintah daerah dan Masyarakat di wilayah Madura dalam Pembentukan Pemerintah Provinsi Madura?
3. Bagaimana suara Tokoh Masyarakat dalam pembentukan Madura menjadi provinsi tersendiri?

4. Apa saja Kelemahan yang dimiliki wilayah Madura dalam Pembentukan Pemerintah Provinsi Madura saat ini?
5. Apa Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dapat diambil dalam wacana Pembentukan Pemerintah Provinsi Madura ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Mengidentifikasi Potensi Anggaran, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki wilayah Madura dalam Pembentukan Pemerintah Provinsi Madura.
2. Mengidentifikasi komitmen dari Pemerintah daerah dan Masyarakat di wilayah Madura dalam Pembentukan Pemerintah Provinsi Madura
3. Mengidentifikasi suara Tokoh Masyarakat dalam pembentukan Madura menjadi provinsi tersendiri
4. Mengidentifikasi Kelemahan yang dimiliki wilayah Madura dalam Pembentukan Pemerintah Provinsi Madura saat ini
5. Merancang Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam wacana Pembentukan Pemerintah Provinsi Madura ?

1.4. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari Kajian Wacana Pembentukan Pemerintah Provinsi Madura ini adalah :

1. Potensi Anggaran, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, komitmen dari Pemerintah daerah dan Masyarakat serta suara Tokoh Masyarakat di wilayah Madura dalam Pembentukan Pemerintah Provinsi Madura.
2. Kelemahan yang dimiliki wilayah Madura dalam Pembentukan Pemerintah Provinsi Madura.
3. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam wacana Pembentukan Pemerintah Provinsi Madura.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari Kajian Wacana Pembentukan Pemerintah Provinsi Madura ini adalah :

1. Wacana Pembentukan Pemerintah Provinsi Madura.
2. Potensi Anggaran, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, komitmen dan suara dari Pemerintah daerah dan Masyarakat di wilayah Madura dalam Pembentukan Pemerintah Provinsi Madura.